

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2026**



**BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan hal yang penting bagi terselenggaranya tata kelola kinerja pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, dokumen ini cukup kritikal dan harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) didasarkan kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya telah dilakukan penyesuaian sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanggulangan Penyakit (P2) Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang baik harus selaras dengan perencanaan organisasi secara menyeluruh (hingga ke unit pelaksana), terintegrasi dengan perencanaan operasional, serta sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sekaligus instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tetap dapat direvisi apabila diperlukan, sesuai perkembangan situasi, kebijakan, maupun kebutuhan organisasi.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja. Kepada semua pihak, Bagian PA Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanggulangan Penyakit (P2) maupun Tim Kerja di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Sidoarjo, 9 Januari 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya

Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM., S.H., MPH., M.Si., MAP., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Sumber Daya Manusia	5
BAB II INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN	9
Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan	10
Rincian Kegiatan	14
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)	14
B. Sumber Pendanaan	15
BAB III PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) (rencana untuk 5 Tahun) yang dibuat berdasarkan pada Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanggulangan Penyakit (P2)/eselon I dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Untuk satuan kerja di tingkat eselon II, dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam memperoleh capaian kinerja yang diinginkan.

Dengan berdasarkan pada RKT yang sistematis maka pelaksanaan RAK dapat dilakukan monitoring tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta berpeluang menemukan langkah alternatif dalam meningkatkan capaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih tepat. Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka BBKK Surabaya perlu menyusun RKT Tahun 2026 yang mengacu pada RAK Tahun 2025-2029.

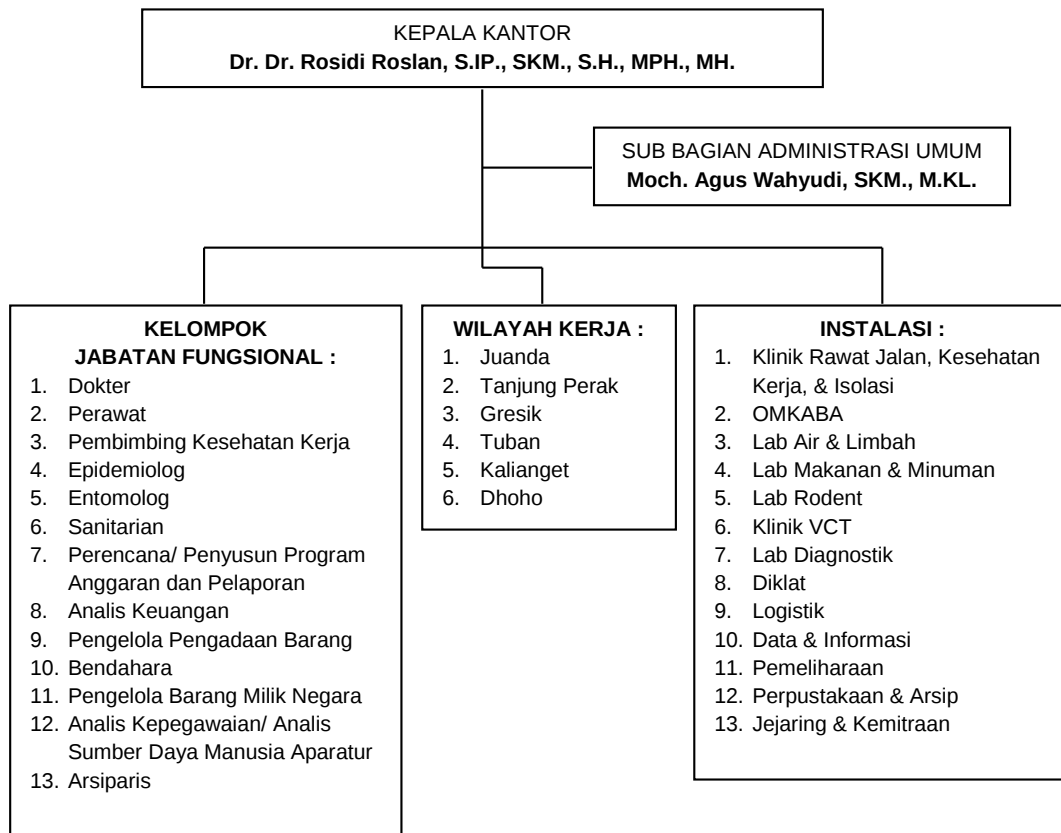
Tujuan penyusunan RKT Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja BBKK Surabaya;
- b. Sebagai bahan acuan Pelaksanaan Kegiatan BBKK Surabaya;
- c. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya RKT sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BBKK Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam permenkes 356/2008 Jo 2348/2011.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBKK Surabaya dapat di lihat pada gambar berikut :

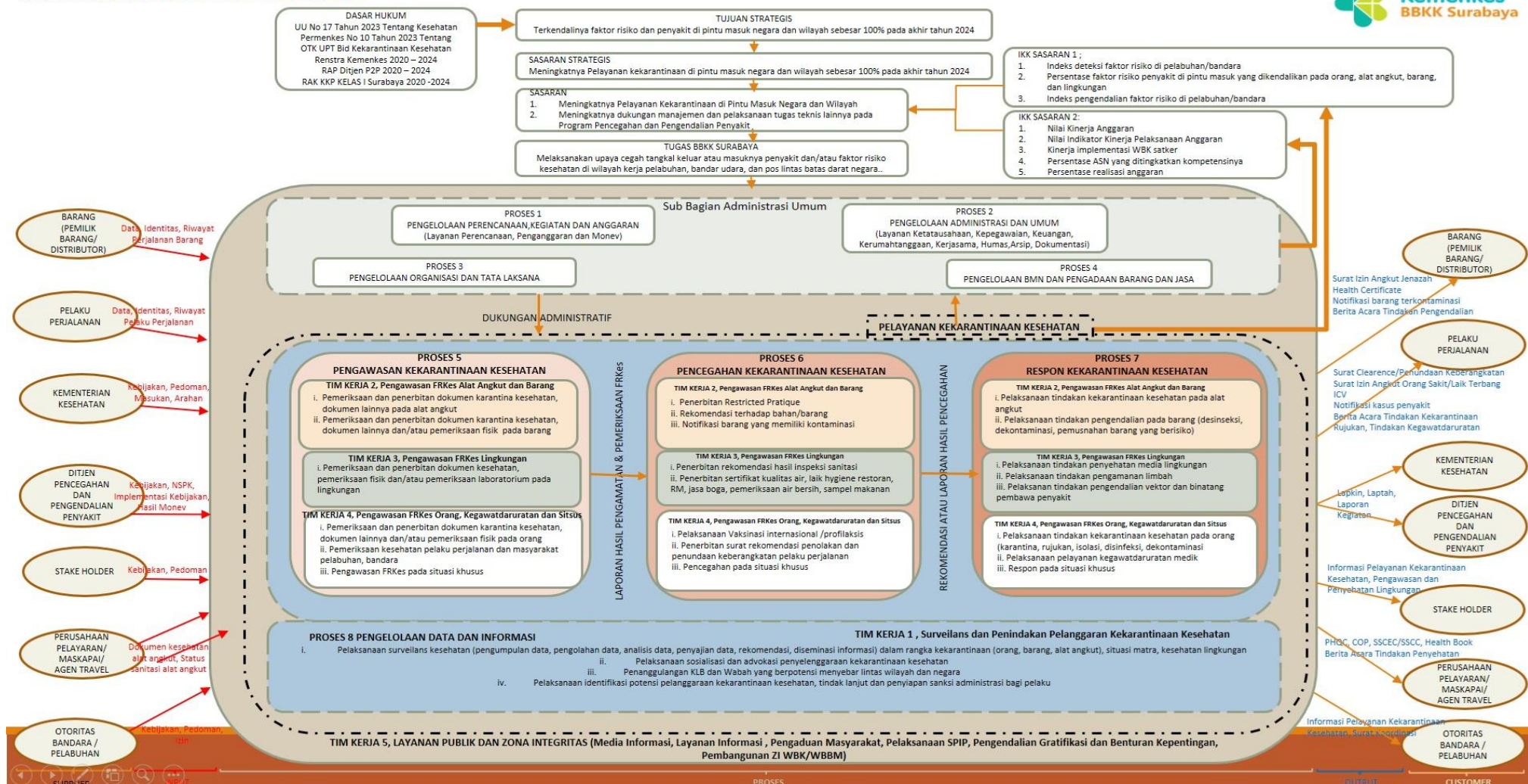


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Bab IV Pasal 7, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Kepala, dengan susunan organisasi BBKK Surabaya terdiri atas:

- a. Sub bagian Administrasi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Tim Kerja

Dalam waktu menunggu Keputusan Menteri Kesehatan terbaru tentang proses bisnis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan serta untuk menyesuaikan struktur organisasi yang baru, maka BBKK Surabaya menyusun proses bisnis sebagaimana tersaji pada gambar. Proses bisnis disusun dengan mengadaptasi dari proses bisnis yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024.

PROSES BISNIS BBKK SURABAYA



a. Sub bagian Administrasi Umum

Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBKK Surabaya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3. Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
4. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.
5. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
6. Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tim Kerja

Dalam rangka menindaklanjuti Diktum Keempat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim kerja. Maka dari itu dibentuklah Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya Nomor HK.02.03/C.IX.7.1/3641/2024 tentang Tim Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Surabaya, maka dibentuk :

▪ **Instalasi**

- 1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- 2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- 3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
- 4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- 5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

▪ **Wilayah Kerja**

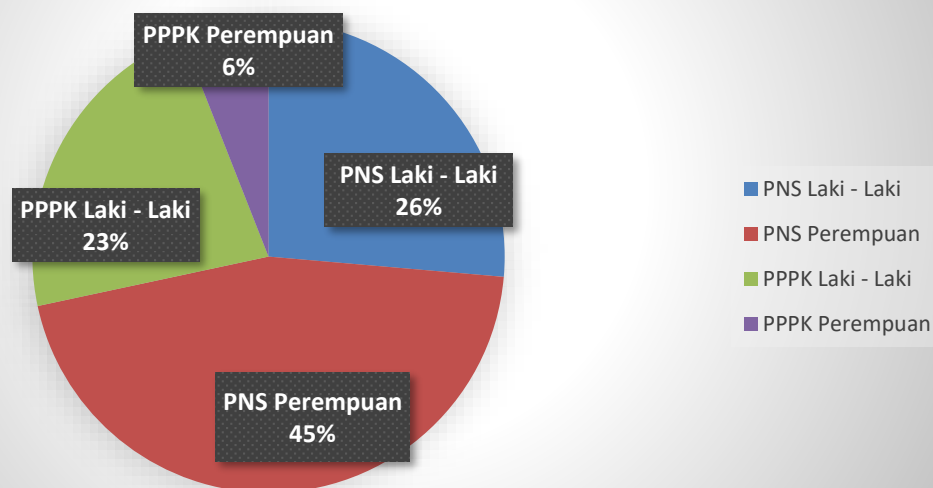
- 1) Wilker merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
- 2) Wilker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural.
- 3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- 4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset BBKK Surabaya dalam mencapai visi dan misinya. Pada Tahun 2026, BBKK Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 201 ASN. Adapun rincian sumber daya manusia yang terdiri dari 144 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 57 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang tersebar di kantor induk (Juanda) dan 5 wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tuban, Pelabuhan Kalianget dan Bandara Dhoho Kediri).

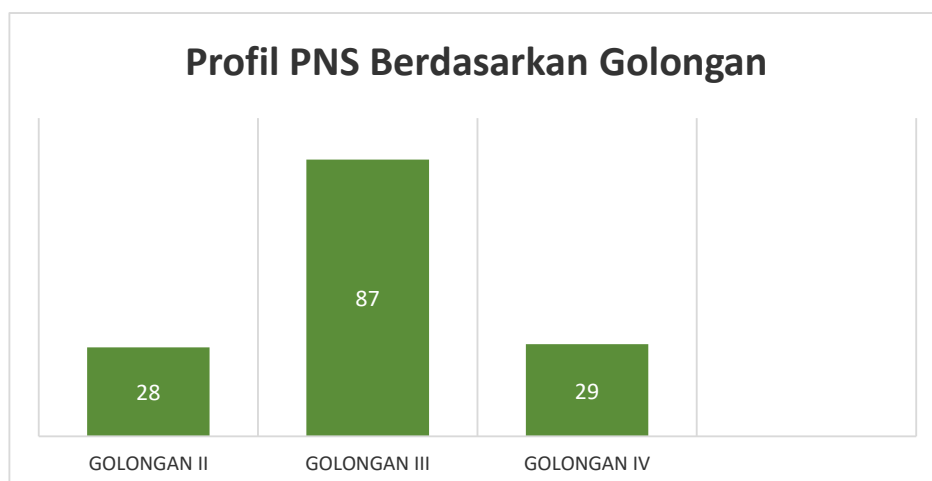
Persentase sumber daya manusia (SDM) BBKK Surabaya pada Tahun 2026 dapat disajikan pada diagram berikut :

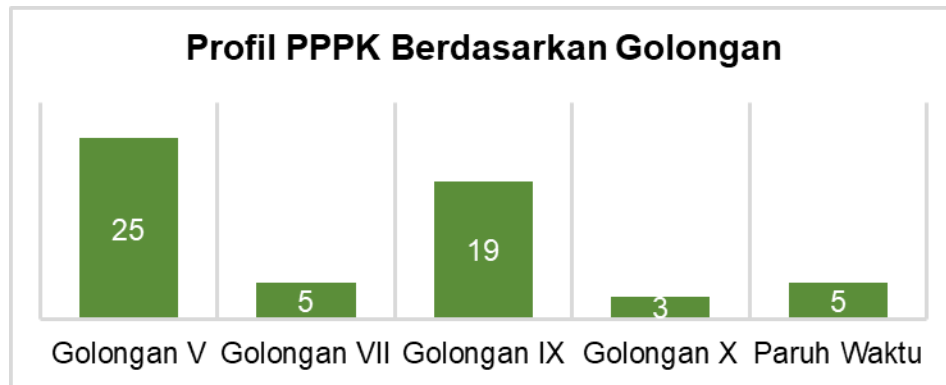
Profil Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram tersebut, terlihat dari dua jenis SDM yang dimiliki BBKK Surabaya yang terdiri dari PNS dan PPPK maka dapat di lihat bahwa tenaga PNS lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 45% dibandingkan dengan PNS yang berjenis kelamin laki-laki hanya sebesar 26%, untuk tenaga PPPK yaitu sebanyak 23% untuk tenaga PPPK laki-laki dan 6% untuk tenaga PPPK perempuan.

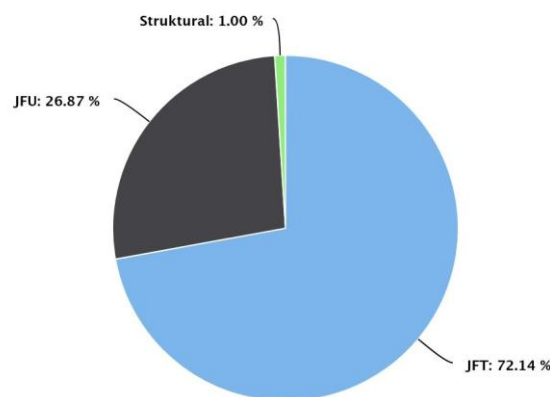
Profil PNS Berdasarkan Golongan





Sebagian besar ASN yang berstatus sebagai PNS di BBKK Surabaya pada Tahun 2026 berada pada golongan III yaitu sebanyak 87 orang yang dimiliki setiap pegawai yaitu minimal berijazah strata 1 dan juga karena pengembangan karir dari setiap ASN. Sedangkan untuk PPPK terdapat golongan V, VII, IX, X dan Paruh Waktu dengan rincian golongan V sebanyak 25 orang, golongan VII sebanyak 5 orang, golongan IX sebanyak 19 orang dan golongan X sebanyak 3 orang serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 orang.

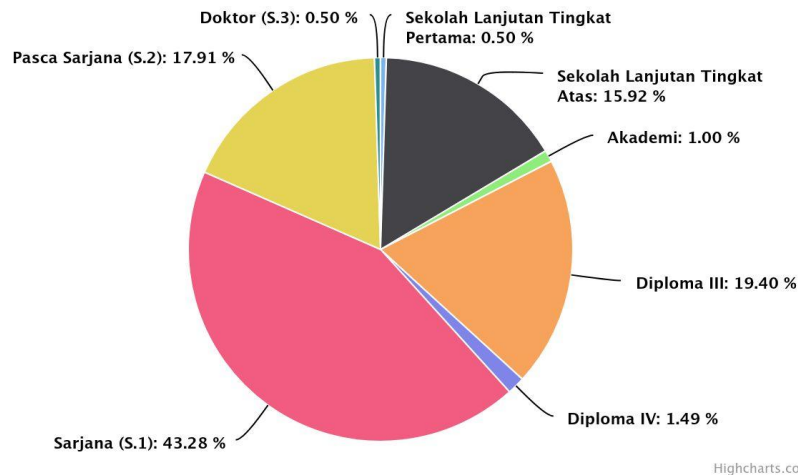
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Highcharts.com

Berdasarkan profil ASN tersebut terdapat sebanyak 145 orang atau sekitar 72,14% ASN dengan status PNS dan PPPK telah memiliki jabatan fungsional sedangkan sebanyak 58 orang atau sekitar 26,87% terlihat masih terdapat yang memiliki jabatan fungsional umum. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) terus mendorong ASN untuk mengembangkan karir dalam jabatan fungsional tertentu melalui proses inpassing. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya terus mendorong setiap ASN yang agar dapat mengikuti pelatihan/diklat fungsional yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Dari data yang disajikan, dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebagian besar telah dimiliki SDM di BBKK Surabaya pada tenaga ASN, sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma tidak sebanyak Sarjana (S1) sebanyak 19.40%. Selain jenjang Sarjana dan Diploma dapat di lihat bahwa masih terdapat SDM yang masih memiliki tingkat pendidikan SMA dan SMP dengan tingkat persentase pendidikan dari tenaga ASN di jenjang pendidikan SMP sebanyak 0,50% dan SMA sebanyak 15,92%. Pada ASN kondisi ini mendorong untuk dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam jenjang pendidikan dalam rangka pengembangan karirnya.

BAB II
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Unit Organisasi/Satker	:	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit/ Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
Program	:	1. Program Sistem Ketahanan Kesehatan; 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Program Sistem Ketahanan Kesehatan 1. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara Program Dukungan Manajemen 1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	1. Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan; 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah; 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan

NO	Sasaran Kegiatan	NO	INDIKATOR	KEGIATAN	Pagu Revisi s.d. Mei 2026
1	Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	1	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Koordinasi pelayanan kekarantinaan pelabuhan/bandara/PLBD	103.968.000
				Koordinasi pelayanan kekarantinaan wilayah kerja	45.264.000
				Sosialisasi regulasi kekarantinaan dan diseminasi informasi pelaksanaan kekarantinaan	33.522.000
				Penyuluhan penjamah makanan pra operasional Matra Haji	15.580.000
				Penyuluhan penjamah makanan di pelabuhan dan bandara	33.600.000
				Pemeriksaan penjamah makanan di pelabuhan dan bandara	25.440.000
				Monitoring/Evaluasi ke klinik/RS dalam rangka penerbitan ICV	244.176.000
				Verifikasi ke klinik/RS dalam rangka penerbitan ICV	133.540.000
				Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus Bencana/KLB	166.564.000
				Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus Event Nasional	44.970.000
				Pengiriman Sample Surveilans	5.880.000
				Pembinaan Kesehatan Jamaah Umrah dan Vaksinasi	328.872.000
				Pengawasan/Pemeriksaan Minuman Makanan Usap Alat Kegiatan Matra	139.666.000
				Pengawasan/Pemeriksaan Bakteri Leptospira	45.936.000
				Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I Sanitasi Asrama dan Jasaboga Pesawat Haji	6.244.000
				Pengambilan Sampel Air Bersih Pemeriksaan Tahap I Asrama Haji dan Jasaboga Pesawat Haji Pemeriksaan Pertama	2.612.000
				Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II Sanitasi Asrama dan Jasaboga Pesawat Haji	6.244.000
				Pengambilan Sampel Air Bersih Pemeriksaan Tahap II Asrama Haji dan Jasaboga Pesawat Haji Pemeriksaan Pertama	2.612.000

			Pengawasan Pestisida	5.780.000
			Uji Resistensi	22.260.000
			Uji Petik Pemeriksaan Makanan Secara Mikrobiologi	7.248.000
			Pengawasan/Pemeriksaan Bakteri Legionella	7.000.000
			Pemeriksaan penjamah makanan di pelabuhan dan bandara	153.924.000
			Pengelolaan Limbah Medis	82.960.000
			Penyelidikan epidemiologi dan Koordinasi dengan Lintas sektor	92.032.000
			Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Kalianget	58.715.000
			Pertemuan Table Top Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Gresik	39.533.000
			Pertemuan Table Top Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Brondong Tuban	64.005.000
			Pengawasan Health Certificate OMKABA	127.296.000
			Koordinasi Health Certificate OMKABA dengan Lintas Sektor	124.038.000
			Operasional Pelayanan Kesehatan Deteksi Dini HIV	24.032.000
			Operasional Pelayanan Kesehatan Deteksi Dini Terduga TB	24.372.000
			Pengendalian vektor DBD	90.724.000
			Pemetaan	3.658.000
			Persiapan Bahan dan Alat	45.253.000
			Pemasangan Perangkat	122.838.000
			Identifikasi Tikus dan Pinjal	1.180.000
			Pengendalian Vektor Diare	22.172.000
			Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	64.800.000
			Survei Vektor Malaria	41.280.000
			Survei Vektor Diare	38.160.000
			Deteksi Dini Terduga HIV AIDS	18.396.000
			Deteksi Dini Terduga TB	81.825.000
			Survei Faktor Risiko Penyakit DBD Kategori II	2.880.000
			Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi skala besar	1.056.240.000
			Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi skala besar	978.570.000
			Layanan Kesehatan pada	744.120.000

2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2	Nilai SAKIP	situasi khusus Pelabuhan	
				Peralatan Penunjang Ambulance Klinik	99.430.000
				Sarana Pelayanan Kesehatan Terbatas Masyarakat Pelabuhan dan Bandara	120.797.000
				Sarana Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus	42.449.000
				Sarana Pengawasan Vektor dan Sanitasi	90.820.000
				APD Pemeriksaan Pelabuhan dan Bandara	961.660.000
				Pemeliharaan Alat Kesehatan	446.944.000
				Bahan Pendukung Dokumen Kekejarantinaan Kesehatan	74.600.000
				Total indikator 1	7.366.681.000
		3	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Penyusunan Laporan Tahunan	4.590.000
				Penyusunan Laporan Kinerja	4.590.000
				Desk Penyusunan Laporan Kinerja	42.348.000
				Desk SAKIP	77.976.000
				Total indikator 2	129.504.000
				Penyusunan ABK Kepegawaian	25.424.000
				Pengelolaan Arsip Inaktif di Record Centre Tanjung Perak dan pendukung perlengkapan kearsipan	15.904.000
				Gaji dan Tunjangan PNS	23.829.434.000
				Gaji dan Tunjangan PPPK	5.754.867.000
				Honor yang terkait dengan Operasional Kerja	135.720.000
				Jasa Pos/Giro/Sertifikat	9.500.000
				Penggandaan, Penjilidan, dan Laminasi	5.400.000
				Pembuatan ID Card dan Pengurusan Pas Bandara Personil/Mobil	130.826.000
				Bahan Operasional Perkantoran	360.902.000
				Medical Check Up dan Tes Narkoba Pegawai	674.857.000
				Langganan Aplikasi	21.249.000
				Rapat Koordinasi dengan LS/LP	181.440.000
				Peningkatan Kapasitas Administrasi dan Manajemen dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan publik	17.360.000
				Peningkatan Kapasitas Surveilans Penyakit Potensial Wabah	58.820.000
				Peningkatan Tata Laksana Penanganan Pelanggaran	23.712.000

			Kekarantinaan Kesehatan	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Epidemiolog	71.136.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Fumigasi	56.900.000
			Peningkatan Kapasitas Basic Sea Survival	113.800.000
			Peningkatan Kapasitas Pengendalian Vektor Hama, Alat Angkut, dan Lingkungan	56.900.000
			Peningkatan Kapasitas Penyusunan Baseline Data Pengawasan Alat Angkut dan Barang	56.900.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Entomolog Kesehatan	34.970.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Sanitarian	50.216.000
			Peningkatan Kapasitas ACLS	26.936.000
			Peningkatan Kapasitas BTCLS	26.936.000
			Peningkatan Kapasitas kompetensi dokter	153.600.000
			Peningkatan Kapasitas kompetensi perawat	153.600.000
			Peningkatan Kapasitas kompetensi pembimbing kesehatan kerja	15.022.000
			Total indikator 3	32.062.331.000
	4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	732.809.000
			Perawatan Gedung Kantor	1.256.294.000
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	196.000.000
			Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	511.218.000
			Perawatan Kendaraan Roda 2/4	853.195.000
			Perawatan Sarana Gedung	108.645.000
			Langganan Daya dan Jasa	1.259.340.000
			Sewa kendaraan operasional	239.020.000
			Total indikator 4	5.156.521.000
	5	Persentase Realisasi Anggaran	Penyusunan RKBMN	14.116.000
			Penyusunan perencanaan PNB	34.656.000
			Verifikasi perencanaan PNB	34.656.000
			Total indikator 5	83.428.000
	6	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk	Pelaksanaan Kekarantinaan di Pelabuhan Penyeberangan	184.800.000
			Pelaksanaan	654.720.000

			alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	Kekarantinaan Kesehatan di Bandara	
				Total indikator 6	839.520.000
		7	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	Sarana Promosi Kesehatan	78.275.000
				Total indikator 7	78.275.000
				Jumlah	45.716.260.000

Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Tahun Berjalan 2026 - s.d. Mei				Prakiraan Maju					
		Volume	Pagu Satuan Biaya	Blokir/Efisiensi (%)	Realisasi	Volume			Alokasi		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
DZ	Program Sistem Ketahanan Kesehatan										
DZ.7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	6.521			1.726.931.396	6.521	6.521	6.521	8.284.476.000	8.284.476.000	8.284.476.000
PEA	Koordinasi	60	8.284.476.000	2.160.897.000	7.160.000	60	60	60	149.232.000	149.232.000	149.232.000
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	60	149.232.000	74.616.000	7.160.000	60	60	60	149.232.000	149.232.000	149.232.000
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	505	82.702.000	18.806.000	11.604.900	505	505	505	82.702.000	82.702.000	82.702.000
PEF.001	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	505	82.702.000	18.806.000	11.604.900	505	505	505	82.702.000	82.702.000	82.702.000
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.316	949.442.000	470.001.000	-	2.316	2.316	2.316	949.442.000	949.442.000	949.442.000
QAA.001	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	2.316	949.442.000	470.001.000	-	2.316	2.316	2.316	949.442.000	949.442.000	949.442.000
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3.459	5.188.125.000	1.318.522.000	1.478.763.936	3.459	3.459	3.459	5.188.125.000	5.188.125.000	5.188.125.000
QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1.235	482.486.000	142.832.000	87.198.536	1.235	1.235	1.235	482.486.000	482.486.000	482.486.000
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	150	554.023.000	271.700.000	62.633.100	150	150	150	554.023.000	554.023.000	554.023.000
QAH.001	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	280	184.800.000	75.600.000	25.669.800	280	280	280	184.800.000	184.800.000	184.800.000
QAH.002	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	744	654.720.000	267.840.000	105.770.000	744	744	744	654.720.000	654.720.000	654.720.000
QAH.007	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	74	90.724.000	29.201.000	9.572.850	74	74	74	90.724.000	90.724.000	90.724.000
QAH.008	Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis	59	172.929.000	65.562.000	46.627.750	59	59	59	172.929.000	172.929.000	172.929.000
QAH.009	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	46	22.172.000	8.473.000	2.862.500	46	46	46	22.172.000	22.172.000	22.172.000
QAH.011	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	180	64.800.000	30.960.000	9.520.000	180	180	180	64.800.000	64.800.000	64.800.000
QAH.012	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	24	41.280.000	20.448.000	4.250.000	24	24	24	41.280.000	41.280.000	41.280.000
QAH.013	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	72	38.160.000	18.504.000	4.845.000	72	72	72	38.160.000	38.160.000	38.160.000
QAH.014	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	14	18.396.000	3.743.000	12.146.400	14	14	14	18.396.000	18.396.000	18.396.000
QAH.015	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	15	81.825.000	10.223.000	23.422.000	15	15	15	81.825.000	81.825.000	81.825.000
QAH.022	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD di asrama haji dalam kota	8	2.880.000	1.376.000	170.000	8	8	8	2.880.000	2.880.000	2.880.000
QAH.027	Layanan Kesehatan Haji pada masa Embarkasi skala besar	9	1.056.240.000	-	943.520.000	9	9	9	1.056.240.000	1.056.240.000	1.056.240.000
QAH.030	Layanan Kesehatan Haji pada masa Debarkasi skala besar	9	978.570.000	-	-	9	9	9	978.570.000	978.570.000	978.570.000
QAH.031	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara	540	744.120.000	372.060.000	140.556.000	540	540	540	744.120.000	744.120.000	744.120.000
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	181	1.914.975.000	278.952.000	229.402.560	181	181	181	1.914.975.000	1.914.975.000	1.914.975.000
RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	181	1.914.975.000	278.952.000	229.402.560	181	181	181	1.914.975.000	1.914.975.000	1.914.975.000
WA	Program Dukungan Manajemen										
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	115	37.431.784.000	467.386.000	12.119.074.692	115	115	115	11.596.748.000	11.596.748.000	11.596.748.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43	36.445.664.000	88.802.000	12.117.560.692	43	43	43	10.610.628.000	10.610.628.000	10.610.628.000
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	13	184.948.000	88.802.000	3.408.000	13	13	13	184.948.000	184.948.000	184.948.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	30	36.260.716.000	-	12.114.152.692	30	30	30	10.425.680.000	10.425.680.000	10.425.680.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	70	916.808.000	343.928.000	1.514.000	70	70	70	916.808.000	916.808.000	916.808.000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	70	916.808.000	343.928.000	1.514.000	70	70	70	916.808.000	916.808.000	916.808.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2	69.312.000	34.656.000	-	2	2	2	69.312.000	69.312.000	69.312.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	69.312.000	34.656.000	-	2	2	2	69.312.000	69.312.000	69.312.000
	Total	6.636	45.716.260.000	2.628.283.000	13.846.006.088	6.636	6.636	6.636	19.881.224.000	19.881.224.000	19.881.224.000

B. Sumber Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Komponen	Alokasi per Sumber Pendanaan TA 2026				Lokasi
		RM	PNBP	Blokir/Efisiensi (*)	Efektif	
DZ	Program Sistem Ketahanan Kesehatan					
DZ.7960	Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	-	8.284.476.000	2.160.897.000	6.123.579.000	
PEA	Koordinasi	-	149.232.000	74.616.000	74.616.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	-	149.232.000	74.616.000		
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	82.702.000	18.806.000	63.896.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
PEF.001	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	-	82.702.000	18.806.000		
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	-	949.442.000	470.001.000	479.441.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
QAA.001	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	-	949.442.000	470.001.000		
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	5.188.125.000	1.318.522.000	3.869.603.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	-	482.486.000	142.832.000		
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	-	554.023.000	271.700.000		
QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	-	184.800.000	75.600.000		
QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	-	654.720.000	267.840.000		
QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	-	90.724.000	29.201.000		
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes dan leptospirosis	-	172.929.000	65.562.000		
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	-	22.172.000	8.473.000		
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	-	64.800.000	30.960.000		
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	-	41.280.000	20.448.000		
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	-	38.160.000	18.504.000		
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	-	18.396.000	3.743.000		
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	-	81.825.000	10.223.000		
QAH.U22	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD di asrama haji dalam kota	-	2.880.000	1.376.000		
QAH.U27	Layanan Kesehatan Haji pada masa Embarkasi skala besar	-	1.056.240.000	-		
QAH.U30	Layanan Kesehatan Haji pada masa Debarkasi skala besar	-	978.570.000	-		
QAH.U31	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara	-	744.120.000	372.060.000		
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	1.914.975.000	278.952.000	1.636.023.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	-	1.914.975.000	278.952.000		
WA	Program Dukungan Manajemen					
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	36.260.716.000	1.171.068.000	467.386.000	36.964.398.000	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	36.260.716.000	184.948.000	88.802.000	36.356.862.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	-	184.948.000	88.802.000		
EBA.994	Layanan Perkantoran	36.260.716.000	-	-		
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	916.808.000	343.928.000	572.880.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-	916.808.000	343.928.000		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	69.312.000	34.656.000	34.656.000	Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Sumenep
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	69.312.000	34.656.000		
Total		36.260.716.000	9.455.544.000	2.628.283.000	43.087.977.000	

BAB III

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBKK Surabaya supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan dokumen RKT untuk jangka waktu satu tahun yang disusun secara sistematis dan RAK untuk jangka waktu lima tahun, yang merupakan turunan dari RAP Ditjen P2 dan Renstra Kemenkes. RKT BBKK Surabaya Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama setahun pada Tahun 2026. Dokumen RKT menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama Tahun 2026, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan dokumen RKT yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.